

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah bentuk dari kemajuan dari sebuah negara, pembangunan dari semua bidang baik pembangunan ekonomi ataupun pembangunan di bidang infrastruktur. Dalam sebuah pembangunan proyek itu membutuhkan biaya dan oleh karena itu dari awal diperlukan pemikiran yang matang sebelum memutuskan bahwa proyek itu dapat mulai dilaksanakan. Perencanaan yang matang dan tersusun juga diperlukan dalam pembangunan sebuah proyek. Tetapi, dalam kenyataannya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai masalah dapat ditemui di berbagai bagian dari rencana pemerintah tersebut. Masalah tersebut sangat kompleks dan terdapat pada berbagai bidang kehidupan masyarakat maka dari itu perencanaan sangatlah penting dalam sebuah proses pembangunan.

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara untuk mencapai tujuan tersebut. T. Hani Handoko (1995) mengemukakan perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penetapan strategi,

kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, system anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹

Kegiatan dari perencanaan itu sendiri menurut Allen (Manulang, 2005: 40), adalah :²

- 1) Meramalkan (*forecasting*);
- 2) Menetapkan maksud dan tujuan (*establishing objective*);
- 3) Mengacarakan (*programming*);
- 4) Menyusun tata waktu (*scheduling*);
- 5) Menyusun anggaran (*budgeting*);
- 6) Mengembangkan prosedur (*developing procedure*);
- 7) Menetapkan dan menafsirkan kebijakan (*establishing and interpreting policy*).

Pada tahap ini diidentifikasi berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan dan biayanya, termasuk di dalamnya adalah *supply* logistik, agar masing-masing kegiatan bisa berjalan dengan lancar.³ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan proyek antara lain :

1. Menentukan tujuan proyek yang akan dibangun.
2. Menentukan jadwal waktu.

¹H.A. Dimiyati Hamdan, Nurjaman kadar. (2014). *Manajemen Proyek*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet, 1.

Hlm.7

²*Ibid.*, hlm.79

³Husnan Saud. (2005), *Studi Kelayakan Proyek*, Yogyakarta Unit Penerbitan dan Percetakan, hlm 134

3. Menentukan anggaran dan sumber-sumber dana.
4. Menentukan organisasi pelaksana.
5. Menentukan kebijakan dan prosedur.⁴

Sebuah pembangunan akan melalui tahapan yang begitu panjang sebelum ditetapkan menjadi keputusan oleh pemerintah, dan pada proses ditetapkan dan di putuskan sebuah proyek pembangun terlebih dahulu harus melalui proses perencanaan kebutuhan, dimana proyek pembangunan ini dipertimbangkan apakah memang dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat, dan proses perencanaan kebutuhan ini melibatkan masyarakat melihat kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Setelah mantap bahwa proyek itu sudah perlu dilaksanakan, maka dimulailah perencanaan yang matang. Salah satu tujuan perencanaan proyek adalah untuk meningkatkan efisiensi dan operasionalnya.⁵

Sebuah pembangunan seharusnya melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat serta meminta tanggapan dan pendapat masyarakat terkait sebuah proyek pembangunan yang akan dibangun karena apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat itu yang akan membuat sebuah negara berdaulat dan berjalan sistem demokrasinya, dan inilah yang ada didalam demokrasi deliberatif, kata deliberatif berasal dari kata Latin *deliberation* atau deliberasi (Indonesia) yang artinya konsultasi,

⁴*Ibid.*, hlm 124

⁵Kunarjo. (2002).*Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta : UI Press, hlm 84

musyawarah, atau menimbang-nimbang. demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik.⁶

LRT adalah sebuah proyek pembangunan yang proses pembangunannya cuma memakan waktu kurang lebih selama 3 tahun dan berita mengenai pembangunan tiang pancang jalur kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terus berjalan seiring waktu. Sejak pembangunannya di awal Desember 2015, berbagai peristiwa yang berkaitan dengan LRT terus bermunculan. Keputusan dalam penetapan pembangunan proyek LRT ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang memiliki wewenang tanpa melihat kebutuhan dan apa yang diperlukan masyarakat.

Bagi masyarakat Palembang yang terkena dampak besar pembangunan LRT, mereka tentu berharap bahwa pengorbanan mereka dengan merasakan macet hingga 100 persen dari sebelumnya akan terbalas setim pal dengan berkurangnya kemacetan setelah dibangunnya proyek LRT.

Masyarakat yang dimaksud adalah kalangan masyarakat menengah kebawah yaitu pedagang, petani, nelayan dan masyarakat-masyarakat biasa yang mempunyai ormas sosial, politik, budaya, dan kelompok-kelompok penekan dan kelompok kepentingan, pada saat pembangunan

⁶F. Hardiman Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta : PT Kanisius, hlm.128

LRT akan dibangun apakah mereka dikumpulkan dan diberitahu serta diikuti sertakan dalam proses pembangunan LRT.

LRT tentu saja adalah sebuah kebijakan politik yang dibungkus oleh proyek publik. Menurut *Price J. Gitinger* dalam buku “*Dalam Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan*” Mengatakan Proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu”.⁷

Berdasarkan definisi tersebut, proyek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Proyek mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa.
2. Proyek membutuhkan masukan (*input*) berupa sumber-sumber yang langka seperti modal, tenaga buruh, tanah, dan kepemimpinan.
3. Proyek mempunyai titik awal dan titik akhir.
4. Dalam waktu tertentu setelah proyek selesai, mulai dapat menghasilkan.⁸

Berbagai peristiwa tentang pembangunan LRT Palembang selalu menyedot perhatian masyarakat dan media yang langsung menjadikannya sebagai berita yang menjadi agenda utama pembicaraan. Tidak ingin ketinggalan dengan media cetak, televisi, radio, media cetak yang terbit secara online di internet pun menjadikan berita ini sebagai headline

⁷Price J. Gitinger, (19972).*Economic Analysis Of Agricultural Project* , Baltimore and London : The John Hopkins University Press, hlm.2

⁸*Ibid.*, hlm 2

mereka. Begitu pula dengan Sumatera Ekspres Online, salah satu media cetak terkemuka di Sumatera Selatan yang menjadikan berita tentang Pembangunan LRT Palembang terus menjadi berita.

Pembangunan LRT di Palembang ini sendiri ditargetkan selesai pada Juni 2018 atau sebelum penyelenggaraan *Asian Games* 2018 di Palembang dan Jakarta. Pembangunannya berupa jalur layang (*elevated track*) yang juga dilengkapi prasarana lainnya, yaitu 13 Stasiun LRT, 1 jembatan (yang sejajar dengan jembatan yang melintasi Sungai Musi) dan 1 depo. LRT Palembang sendiri memiliki panjang total 23,40 kilometer yang menghubungkan Bandara SMB II Palembang sampai dengan kompleks olahraga Jakabaring (JSC).⁹

Pembangunan jalan layang kereta LRT Palembang tidak menggunakan *ballast* (batuan kricak) tetapi dengan menggunakan teknologi *slab track* (bantalan beton) dengan lebar jalan rel adalah 1.067 mm dengan tipe rel R.54 dan beban gandar 12 ton. Stasiun LRT memiliki ketinggian minimum ruangan sebesar 2,7 meter dengan jarak minimal clearance dengan jalan raya 5,2 meter. Pembangunan LRT Palembang meliputi konstruksi dan supervisi dibiayai oleh APBN sebesar Rp 11,49 triliun dengan *Multiyears contract* atau kontrak tahun jamak (2016–2018).¹⁰

⁹Ardan Ardhi Chandra Berita Ekonomi Bisnis, <http://finance.de.tik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3156450/ini-penampakan-proyek-LRT-palembang-yang-akan-dicek-jokowi>, Diakses tanggal 09 Mei 2019

¹⁰*Ibid*

Fakta yang ada saat ini dikutip dari Rmol Sumsel permasalahan LRT Palembang sudah tidak terbendung lagi, belasan triliun rupiah yang digelontarkan pemerintah untuk mengatasi kemacetan melalui penyediaan modal transportasi yang nyaman, justru menimbulkan masalah baru.

Pengamat sosial, politik dan kebijakan publik, Bagindo Togar melihat, setelah sekian lama mendengar ‘bisik-bisik’ yang mengusik kegalauan publik atas mega proyek LRT Palembang, saat ini tidak terbendung lagi. Pemerintah dan pengelolaan bingung campur panik mencari solusi atas pembiayaan operasional yang sangat jauh tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari para pemakai jasa angkutan massal itu. Untuk biaya suplai listrik saja butuh anggaran lebih dari Rp 7 Miliar perbulan, sedangkan pendapatan dari operasional LRT tidak mencapai Rp 1 Miliar per bulan.¹¹

Tidak hanya itu dilansir dari Tribun Sumsel sejak tanggal 26 Juni 2019, PLN melakukan pemutusan aliran listrik untuk lampu penerang jalan umum *Light Rail Transit* (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palembang PT PLN Persero, Nanang Prasetyo mengatakan, pemutusan itu dilakukan setelah adanya tunggakan pembayaran Selama enam bulan.

Pemerintah Kota Palembang enggan membayar tunggakan listrik di jalan bawah jalur *Ligh Rail Transit* (LRT) Palembang lantaran sampai saat

¹¹<http://www.rmolsumsel.com/read/2019/01/31/108692/Permasalahan-LRT-PalembangTak-Terbendung-Lagi-Kantor-Berita-RMOL-SUMSEL>, Diakses pada 15 Juli 2019

ini belum ada serah terima aset dari pihak kontraktor. Pemkot Palembang Amiruddin Sandi mengatakan, pemkot Palembang tidak akan membayar tagihan LRT Sumsel yang mencapai Rp 189 juta, karena belum ada serah terima aset. Sampai saat ini, tanggung jawab pembayaran listrik LRT masih dipegang penuh oleh Waskita Karya.¹²

Meski diakui Pembangunan LRT Palembang membawa peran besar bagi Kota Palembang, namun akibat yang harus dirasakan oleh masyarakatnya selama proses pembangunan berlangsung jelas tidak sedikit, banyak sekali akibat dalam pembangunan ini. Selain itu, proses pembangunan pun mengalami cukup banyak hambatan. Banyaknya fasilitas umum, seperti pipa PDAM Tirta Musi, kabeltelepon (Telkom) serta jaringan listrik (PLN) yang harus di hancurkan dan ditata ulang kembali karena pembangunan proyek LRT ini.

Fasilitas umum ini harus dipindahkan agar semuanya tetap berfungsi seperti biasa. Bahkan, pembangunan LRT akan melalui pembuatan jembatan layang, sehingga sistemnya harus diubah agar tidak mengganggu. Ditambah lagi kemacetan yang sangat parah disebabkan oleh pembangunan proyek LRT selama 2 tahun sangat terasa sekali dan pemerintah juga tidak menyediakan alternatif lain untuk mengatasi kemacetan, dan yang menjadi korban lagi-lagi adalah masyarakat selama

¹²TribunSumsel-<https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/03/listrik-lampu-jalur-lrtdiputus-karena-nunggak-pemkot-palembang-sebut-tanggung-jawab-waskita-karya> Diakses pada 15 juli 2019

kurang lebih 2 tahun mengalami kemacetan akibat pembangunan proyek LRT ini.¹³

Dalam penelitian demokrasi deliberatif penelitian ini juga akan membahas demokrasi partisipatori, demokrasi paprisipatori adalah unsur dalam demokrasi deliberatif yang menjadi penengah atau penyeimbang apabila terjadi konflik didalam demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatori akan sangat tegas mengambil kebijakan yang sudah dimusyawarahkan untuk penyelesaian konflik dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengambil kebijakan yang tegas dalam menyelesaikan konflik berbeda pendapat didalam demokrasi deliberatif.

Setelah melalui proses yang terbilang singkat, pada 2018 kemarin pembangunan LRT ini sudah mulai beroperasi, dari kalangan masyarakat sendiri ada sebagian yang menggunakan LRT yaitu mereka yang dari Bandara ke Kota memang pilihan yang paling efektif jika kita dari Bandara mau ke Kota akan sangat membantu dan akan terhindar dari kemacetan.

Peneliti akan melihat bagaimana proses pembangunan proyek LRT dan adakah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan *Light Rail Transit* ini, seperti tujuan dalam demokrasi deliberatif untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi agar sebuah kebijakan sesuai dengan harapan dan itulah fungsi dari ruang publik dalam

¹³*Ibid*

demokrasi deliberatif. Kilas balik lagi pada proses pembangunan proyek LRT tahap perancangan merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dan ruang publiklah yang menjadi tempat menyalurkan aspirasi dan opini publik agar keinginan dari publik itu bisa terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan peneliti di atas maka peneliti memilih judul Pembangunan Proyek LRT di Kota Palembang Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam penetapan pembangunan proyek LRT di Kota Palembang ?
2. Bagaimana proses pembangunan proyek LRT di Kota Palembang dalam perspektif demokrasi deliberatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui adakah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan proyek LRT.
2. Untuk mengetahui proses pembangunan proyek LRT di Kota Palembang di tinjau dalam demokrasi deliberatif.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap Ilmu Politik yang mengkaji

tentang proses pembangunan proyek LRT yang berhubungan dengan ruang public atau masyarakat.

2. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data mengenai sebuah proses pembangunan di Kota Palembang dilihat dari perspektif demokrasi deliberatif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur di kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Janus Timbo dalam *Formasi Public Sphere Dalam Masyarakat Transisional*.¹⁴ Meneliti tentang partisipasi warga yang secara luas berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan menjelaskan pengambilan kebijakan yang sering kali didasarkan pada kepentingan privat semata dan tidak didasarkan pada publik.

Penelitian ini hanya sebatas penggambaran tentang formasi *public sphere* dalam perumusan Perda Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat itu dirancang, dirumuskan dan disosialisasikan ke masyarakat Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam konteks *public sphere*. Dimana peneliti

¹⁴Janus Timbo, *Formasi Public Sphere Dalam Masyarakat Transisional*, Vol. 3, No.2, Tahun 2007

menggambarkan realita keputusan pemerintah dalam mengelola limbah padat dan keputusan itu dihubungkan dengan *public shepre* dan melihat bagaimana partisipasi masyarakat terkait keputusan tersebut. Jadi dalam penelitian ini meneliti keterlibatan masyarakat didalam Perda Nomor 03 Tahun 2007 Tentang limbah Padat.

Yadi Supriadi dalam *Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas*.¹⁵ Peneliti membahas kaitan pers dan ruang publik dimana ruang publik sebagai wadah bagi para jurnalis untuk mendapatkan informasi dan keinginan masyarakat yang kemudian disampaikan kepada media untuk dijadikan sebuah wacana agar dibaca oleh pemerintah dan keinginan masyarakat tersebut bisa terpenuhi, dalam penelitian ini sebatas menjelaskan hubungan yang dimiliki ruang publik dan pers dalam mencapai keinginannya, dan ruang publik didalam pers mempunyai peran penting yaitu sebagai kontrol dan tempat menampung aspirasi publik yang kemudian berkempang menjadi jurnalis publik.

Wimmiy Halim dalam *Demokrasi Deliberatif Indonesia : konsep partisipasi masyarakat didalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan sebuah konsep negara demokrasi yang sesuai dengan konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas yaitu demokrasi menurut Habermas harus memiliki dimensi

¹⁵Yadi Supriadi, *Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017

¹⁶Wimmiy Haliim, *Demokrasi Deliberatif Indonesia : konsep partisipasi masyarakat didalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*, Vol. 42, No. 1, Tahun 2016

deliberatif, yaitu posisi ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik.

Dalam jurnal ini peneliti ingin membandingkan sebuah sistem demokrasi di Indonesia diukur melalui sebuah demokrasi yang layak untuk diterapkan yaitu demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, yang kemudian peneliti uraikan dalam sebuah konsep pemikiran demokrasi yang lebih baik dan hukum yang responsif serta terciptanya partisipasi masyarakat di dalam sebuah pemerintahan

Fahrul Muzaqqi dalam *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*.¹⁷ Dalam jurnal ini membahas tentang diskursus demokrasi deliberatif yang mengulas dan menjelaskan lebih rinci mengenai demokrasi deliberatif dan mengemukakan beberapa pandangan-pandangan mengenai gagasan demokrasi deliberatif baik dari para teoritis maupun praktisi yang memiliki perbedaan-perbedaan penekanan untuk memperkaya perspektif mengenai diskursus demokrasi deliberatif. Didalam penelitian ini peneliti melihat berbagai sudut pandang dari beberapa ahli mengenai demokrasi deliberatif sehingga peneliti bisa menyimpulkan pandangan-pandangan para ahli mengenai demokrasi deliberatif.

¹⁷Fahrul Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, Vol. 03, No. 01, Tahun 2013

Ristiana Kadarsih dalam *Demokrasi Dalam Ruang Publik : Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Indonesia*.¹⁸ Meneliti tentang media massa yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan pola dan aturan organisasi ,tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik diluar diri media, dengan kata lain penelitian ini menggambarkan sebuah media yang digunakan untuk kelompok kepentingan saja.

Padahal demokrasi ini menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat yang tentunya bertolak belakang dengan media yang membungkam suara rakyat dan berpihak pada kelompok kepentingan, disini ruang publik digunakan sebagai tempat untuk diskusi mengenai hal-hal yang rasional yang tak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum, dan media massa mempunyai fungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen dimana isu-isu permasalahan umum dapat diperdebatkan.

Arif Setiawan dalam *Konsep Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas*.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang konsep ruang publik Jurgen Habermas dan menerapkannya dalam kontek praktis, dalam skripsi ini

¹⁸Ristiana Kadarsih, *Demokrasi Dalam Ruang Publik : Sebuah Pmeikiran ulang Untuk Media Massa Indonesia*

¹⁹Arif Setiawan, (2015). *Konsep Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menjelaskan bagaimana asal mula terbentuknya ruang publik borjuis sampai perubahan struktural ruang publik, dan posisi penelitian hanya sabatas pemahaman konsep ruang publik menurut Jurgen Habermas dalam konteks praktis.

Dari ke enam penelitian terdahulu para peneliti meneliti konsep dan membahas secara rinci pengertian dan pemahaman mengenai demokrasi deliberatif dan menjelaskan secara mendalam apa itu ruang publik , dan belum meneliti tentang keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan sebuah proyek sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses pembangunan proyek LRT dan ingin mengetahui seperti apa ruang publik atau demokrasi deliberataif digunakan atau tidak dalam proses pembangunan proyek LRT ini. Maka penelitian ini sangat berbeda dengna penelitian sebelumnya karena demokrasi deliberatif dan ruang publik dalam penelitian ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan sebuah proyek yang mementingkan dan mengutamakan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

F. Kerangka Teori

a. Pengertian Demokrasi Deliberatif

“Deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang lalu dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau kita telah memiliki kosa kata politis ini “musyawarah”. Semua arti leksikal ini harus ditempatkan dalam konteks

“publik” atau “kebersamaan secara politis” untuk memberi pengertian yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus. penggabungannya dengan istilah “demokrasi” memberi makna khusus pada konsep demokrasi itu.²⁰

Istilah demokrasi deliberatif, dimaksud bahwa suatu gagasan yang dipahami sebagai usaha perdebatan atau perbincangan argumentatif yang mengarah pada hakikat demokrasi yang konsensus rasional. Pada situasi semacam itu para partisipan dialog diandaikan dapat mengatasi pandangan subjektifnya dan bisa membarikan keyakinan yang rasional.

Model deliberatif ini menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural. Model ini dapat secara memadai menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik.

Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka, opini-opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap sah secara universal dan rasional. Akan tetapi opini-opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu

²⁰F. Hardiman Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta : PT Kanisius, hlm.128

terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu.²¹

Demokrasi delibertaif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. Model ini sama sekali tidak memberitahu kita sebelumnya, bagaimana kita dapat menghasilkan alasan-alasan yang bagus, melainkan hanya mengatakan bahwa alasan-alasan yang bagus untuk sebuah keputusan pilitis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi yang diperlukan.

b. Teori Demokrasi Deliberatif

Menurut Jurgen Habermas pekerjaan utama dalam teori hukum dan politik dan fokus utama dalam bab ini adalah antara fakta dan norma dengan subtitile mengungkapkan sumbangan untuk teori wacana hokum dan demokrasi.

Hal inilah yang coba di jelaskan Jurgen Habermas dalam teori demokrasi deliberatif, bagi Jurgen Habermas suatu Negara dapat disebut berdaulat ketika Negara (pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dapat tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Menurut Habermas dalam Taufiq Rahmad teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi Negara hukum dengan melancarkan kegiatan

²¹*Ibid.*, hlm129

diskursus publik di berbagai bidang sosia-politis-kultur untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga Negara.²²

Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negaranya, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhi aturan-aturan itu. Dengan katalain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu.²³

²²Taufiq Rahmat,(2012) *Jurgen Habermas :Demokrasi Deliberatif dan RuangPublik*. Vol.03, No.1

²³Op.cit., hlm.128-129

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif mencakup survei dan penyelidikan fakta dari berbagai jenis. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah deskripsi keadaan urusan seperti yang ada saat ini. Jadi dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana proses pembangunan proyek LRT dan menjelaskan serta memaparkan hubungan demokrasi deliberatif dengan proses pembangunan proyek LRT tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informal) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seseorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosial.²⁴

Peneliti menganalisis proses pembangunan proyek LRT ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif dan akan memberikan deskripsi berupa uraian kalimat bukan uji statistik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti yang mengadopsi desain

²⁴C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi ,Method and Techniques (Second Revises Edition)*, India : Age Internasional, hlm. 2-3

kualitatif dalam melakukan studi. Desain kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung.²⁵

Penelitian yang berjudul Pembangunan Proyek LRT ini menggunakan pendekatan penelitian melalui study sosiologi yaitu study tentang kemasyarakatan dan apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Peneliti akan melakukan analisa berupa uraian kalimat dan penjelasan mengenai proses pembangunan proyek LRT dan dihubungkan dengan demokrasi deliberatif.

c. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data primer yaitu hasil dari proses pengumpulan data yang berupa hasil wawancara dan hasil pengoperasionalan proyek LRT setelah pembangunannya selesai.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang data primer berupa foto-foto dari media, catatan-catatan, video, dokumen-dokumen, serta berita-berita yang berkaitan dengan proses pembangunan proyek LRT, serta berita yang berisi informasi mengenai pemadaman lampu jalur LRT dan biaya

²⁵ Usman Husnaini, et al. (2014). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm.29

pengoperasionalan yang tidak seimbang dengan biaya pendapatan per bulan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Masyarakat Kota Palembang yang mengamati langsung proses pembangunan proyek LRT, dan instansi-instansi terkait.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, karena letak proyek LRT tersebut di kota Palembang yaitu di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan rute terakhir di Jakabaring Sport City. Jadi lokasi penelitian tepat di jantung kota Palembang yang melewati jalan Jendral Sudirman, dan melewati masjid Agung dan Ampera dan kemudian stasiun pemberhentian terakhir di Jakabaring tepatnya di Opi Mall Palembang.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya dari masyarakat mengenai bagaimana proses pembangunan proyek LRT yang sudah selesai dibangun apakah melibatkan mereka sebagai masyarakat selaku pengguna dari pembangunan ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan

dilaksanakan nantinya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai yaitu informan.²⁶

Dalam hal ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah digolongkan dan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembangunan proyek LRT yang sudah selesai dibangun, apakah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya, dan wawancara ini ditujukan kepada sumber data yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Masyarakat, dan instansi-instansi terkait.

Informan atau narasumber tersebut dipilih menjadi informan dalam penelitian ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang melakukan pembangunan proyek LRT, DPRD Provinsi selaku wakil

²⁶*Ibid.*, hlm.55

rakyat yang wilayahnya dibangun LRT, dan Masyarakat sekitarnya.

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mengadakan kajian dokumen untuk menunjang data penelitian seperti foto-foto, arsip, berita, gambar, maupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.²⁷

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan beberapa berita mengenai pembangunan proyek LRT, foto-foto mengenai proses pembangunan proyek LRT, dan catatan-catatan yang berisi informasi mengenai proses pembangunan proyek LRT.

c. Metode Observasi

Observasi yaitu kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁸

Dalam metode ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap permasalahan dalam pengoperasionalan LRT baik masalah

²⁷*Ibid.*, hlm.69

²⁸*Ibid.* hlm.52

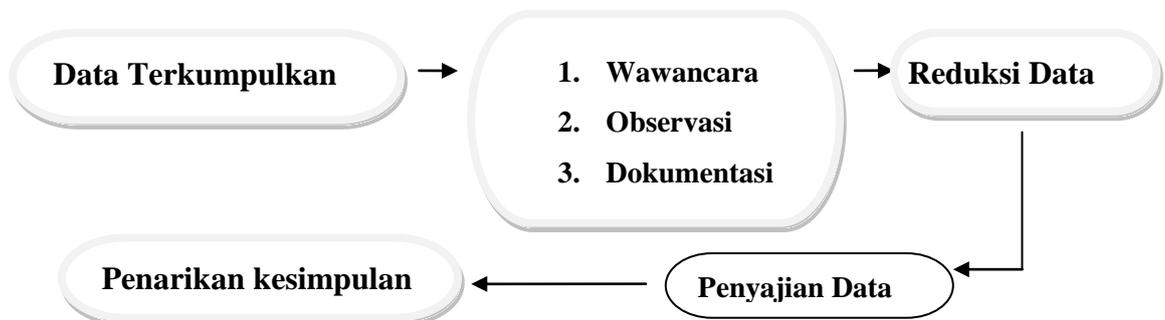
internal maupun eksternal, dan seberapa banyak minat dan antusias masyarakat menaiki transportasi ini.

f. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif, disamping itu penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.

Kemudian data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, digolongkan dan dianalisis dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang proses pembangunan proyek LRT, data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Bagan 1.1 Teknik Analisa Data



Sumber : Diolah peneliti

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu :

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian tersebut, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

Bab II :Gambaran Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang secara terperinci lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III :Pembangunan Proyek LRT di Kota Palembang Dalam Prespektif Demokrasi Deliberatif

Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, data dan informasi dianalisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.